

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)  
TAHUN 2013-2017**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**OLEH:  
FELDASINTYA WARDANI  
NIM: 15840068**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
YOGYAKARTA  
2019**

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)  
TAHUN 2013-2017**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

**OLEH:**

**Feldasintya Wardani  
NIM : 15840068**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Abdul Haris, M. Ag.  
19710423 199903 1 001**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
YOGYAKARTA  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 550821, 512474, Fax. (0274) 586117  
E-mail: [febi@uin-suka.ac.id](mailto:febi@uin-suka.ac.id) Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-791/Un.02/DEB/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Feldasintya Wardani  
NIM : 15840068  
Telah diujikan pada : Jum'at, 9 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
**Ketua Sidang**

**Dr. Abdul Haris, M.Ag.**  
NIP. 19710423 199903 1 001

**Penguji I**

**Dr. H. Slamet Haryono, S.E., M.Si**  
NIP. 19761231 200003 1 005

**Penguji II**

**Yayu Putri Senjani, S.E., M.Sc.**  
NIP. 19760827 200501 1 006

Yogyakarta, 23 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Syaifiq Mahmudah Hanafi, M.Ag**  
NIP. 19620318 199703 1 003

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FE-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Feldasintya Wardani

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

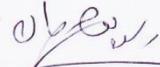
Nama : Feldasintya Wardani  
NIM : 15840068  
Judul Skripsi : "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/ Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Agustus 2019  
**Pembimbing,**

  
**Dr. Abdul Haris, M. Ag.**  
NIP: 19710423 199903 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feldasintya Wardani

NIM : 15840068

Prodi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 01 Agustus 2019

Penyusun



**Feldasintya Wardani**  
NIM. 15840068

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

### HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feldasintya Wardani  
NIM : 15840068  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupatn/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 01 Agustus 2019  
Yang menyatakan



(Feldasintya Wardani)

**MOTTO**

*“Be as yourself as you want.”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,

Karya ini kupersembahkan kepada:

Papa dan Mama Tercinta  
(Joko Edy Wardoyo dan Tatik Suryandari)

Empat saudara tercinta  
Untuk setiap Doa, Motivasi, Nasihat, dan Cinta yang tak berujung

Serta Almamaterku Tercinta  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
---	------	----	----------------------------

ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang

“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	Ditulis	A
—	Kasrah	Ditulis	I
—	Dammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	Ditulis	
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
kasrah + ya' mati	Ditulis	
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
dhammah + wawu mati	Ditulis	
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkapsasa

fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Abdul Haris, M.Ag, Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
4. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Papa mama dan seluruh saudara saya yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Wahyu Nur Rohman untuk setiap Doa, Dukungan, Motivasi yang selalu diberikan disela-sela kesibukannya.

7. Si merah beserta Jalan Jogja–Wonosari yang selama 4 tahun setia menemani lajon dalam menempuh perkuliahan saya.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
9. Semua chill squad: N. Kirana Muharaini, Estining Rahayu, Isna Nur Anisa, Ariffatul Suryaningsih, Roma Hasanah dan Aini Swatika Rani (Nama Groupnya Apa) yang telah mendukung, memotifasi, dan membantu dalam dari awal semester sampai dengan pembuatan skripsi.
10. Semua Sahabat Jajun: Aldy, Fawwaz, Damzun, Ibnu, Roqib, Rafli, Anton, Kirana, Esti, Isna, Ariffa, Tika, Roma dan Ely yang telah memotivasi dalam proses pembuatan skripsi selaku sahabat yang sudah mendukung dan menemani dalam senang maupun duka.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa–jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin

Yogyakarta, 01 Agustus 2019

Feldasintya Wardani

NIM.15840068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II: LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b> .....	<b>16</b>
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	16
B. Otonomi Daerah.....	22
C. Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
D. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	27
E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	30
F. Rasio Keuangan dalam Pandangan Islam .....	34

G.	Telaah Pustaka .....	46
H.	Perumusan Hipotesis.....	55
I.	Kerangka Berfikir .....	64
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>		<b>65</b>
A.	Jenis Penelitian.....	65
B.	Metode Penentuan Sampel.....	65
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	66
D.	Definisi Operasional Variabel.....	66
1.	Rasio Efektivitas PAD.....	66
2.	Rasio Efisiensi PAD .....	67
3.	Rasio Kemandirian Keuangan PAD (RKKD).....	68
4.	Rasio Pertumbuhan PAD.....	69
5.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF).....	70
6.	Rasio Harmoni.....	70
E.	Teknik Analisis Data.....	72
1.	Uji Beda <i>t-test</i> .....	72
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>75</b>
A.	Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).....	75
B.	Deskripsi Objek Penelitian .....	77
C.	Uji Normalitas.....	89
D.	Uji <i>Independent Sample t-Test</i> .....	90
E.	Uji <i>Mann-Whitney</i> .....	109
F.	Pembahasan.....	112
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>		<b>122</b>
A.	Kesimpulan .....	122
B.	Keterbatasan.....	123
C.	Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>125</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini BPK atas LKPD .....	7
Tabel 2.1 Jumlah PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY .....	21
Tabel 2.2 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	68
Tabel 3.1 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	68
Tabel 3.2 Hubungan dan Kapabilitas Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ..	68
Tabel 3.3 Skala Interval Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	110
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013–2017 .....	78
Tabel 4.2 Rata – Rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten & Kota di DIY Tahun 2013–2017.....	81
Tabel 4.3 Rasio Efisiensi PAD Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017	81
Tabel 4.4 Rata – Rata Rasio Efisiensi PAD Kabupaten & Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	82
Tabel 4.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	81
Tabel 4.6 Rata – Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten & Kota di DIY Tahun 2013 – 2017 .....	82
Tabel 4.7 Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017 .....	83
Tabel 4.8 Rata – Rata Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten & Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	83
Tabel 4.9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	84
Tabel 4.10 Rata – Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten & Kota di DIY Tahun 2013 – 2017 .....	85
Tabel 4.11 Rasio Harmoni Belanja Operasi Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	86
Tabel 4.12 Rasio Harmoni Belanja Modal Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017.....	87
Tabel 4.13 Rata – Rata Rasio Harmoni Belanja Operasi Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017 .....	89
Tabel 4.14 Rata – Rata Rasio Harmoni Belanja Operasi Kabupaten dan Kota di DIY Tahun 2013 – 2017 .....	88
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov t-Test</i> .....	89
Tabel 4.16 <i>Group Statistic</i> .....	91
Tabel 4.17 Uji Beda <i>Independent Sample t-Test</i> Rasio Efektivitas PAD .....	93
Tabel 4.18 <i>Group Statistic</i> .....	95
Tabel 4.19 <i>Independent Sample Test</i> Rasio Efisiensi .....	97
Tabel 4.20 <i>Group Statistic</i> .....	100
Tabel 4.21 Uji <i>Independent Sample t-Test</i> Rasio Pertumbuhan PAD .....	101
Tabel 4. 22 <i>Group Statistic</i> .....	104

Tabel 4.23 Uji <i>Independent Sample t-Test</i> Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) .....	106
Tabel 4.24 Uji <i>Mann-Whitney</i> .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	64
Gambar 4.1 Peta Administrasi DIY .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis Perhitungan Data Khusus (APBD dan Realisasi APBD) di Provinsi DIY .....	130
Lampiran 2 Analisis Perhitungan Rasio Keuangan .....	145
Lampiran 3 Hasil <i>Output</i> Uji Normalitas Data .....	146
Lampiran 4 Hasil <i>Output</i> Uji <i>Independent Sample t-Test</i> .....	149
Lampiran 5 Hasil <i>Output</i> Uji <i>Mann-Whitney</i> .....	174

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan yaitu rasio efektivitas APBD, rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari BPK Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan yaitu menggunakan uji beda *Independent Sample T-Test* dan *Mann-Whitney* dengan alat uji SPSS. Hasil penelitian menunjukkan jika terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di DIY dilihat dari rasio kemandirian dan rasio harmoni. Sementara tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di DIY dilihat dari rasio efektivitas APBD, efisiensi APBD, rasio pertumbuhan PAD dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

**Kata Kunci: Rasio Efektivitas APBD, Rasio Efisiensi APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Harmoni.**

## **ABSTRACT**

This study aims to analyze whether there are differences in the financial performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY) in 2013-2017. The variables used are the ratio of APBD effectiveness, APBD efficiency ratio, regional financial independence ratio, PAD growth ratio, degree of fiscal decentralization ratio and harmony ratio. Sampling in this study are the districts / cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The data in this study are secondary data obtained from the Yogyakarta BPK. The analytical tool used to determine the differences in financial performance is using a different Independent Sample T-Test and Mann-Whitney test with SPSS test equipment. The results showed that if there were differences in the financial performance of the district / city government in DIY, it was seen from the independence ratio and harmony ratio. While there is no difference in the financial performance of the district / city government in DIY seen from the ratio of effectiveness of APBD, efficiency of APBD, ratio of PAD growth and degree of fiscal decentralization ratio.

**Keywords: APBD Effectiveness Ratio, APBD Efficiency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Growth Ratio, Fiscal Decentralization Ratio and Harmony Ratio.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi menurut *America Accounting Association* (1996) didefinisikan sebagai seni, ilmu (*science*) maupun perekayasaan (*technology*). Selain itu akuntansi diartikan sebagai sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukan. Jika dilihat dari ragam ukuran dan bentuk organisasi pengguna informasi akuntansi, maka bidang akuntansi dapat di klasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu: akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik.

Akuntansi sektor privat adalah suatu proses akuntansi untuk mencatat aktivitas ekonomi perusahaan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*) atau istilah lainnya adalah perusahaan swasta. Sedangkan akuntansi sektor publik ditujukan bagi organisasi yang bersifat nirlaba, seperti: Yayasan, LSM dan Pemerintah (Pramono, 2014). Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang

atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur oleh hukum (Mahsun, 2013).

Pada sektor publik sangat diperlukan sistem pemerintahan yang baik guna memaksimalkan pelaksanaan pelayanan publik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, sehingga perlu adanya perubahan paradigma lama yang serba sentralistis menjadi paradigma baru yang menuntut suatu sistem untuk mampu mengurangi ketergantungan dan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta dapat memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara baik. Dengan demikian, perlu adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri (Setiyanto, 2018).

Menurut Halim dan Kusufi (2014), otonomi daerah merupakan wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan yang mendasar dan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan (Bastian, 2010).

Dengan demikian melalui otonomi daerah, pemerintah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkannya

kepada masyarakat (publik) secara akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yang bersih inilah yang menjadi tuntutan bagi pemerintah (Zuhri & Soleh, 2016). Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi/berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Fidelius, 2013). Pengelolaan keuangan daerah ini harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Paat, 2013). Untuk itu, pemerintah dengan persetujuan DPR–RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara (Pramono, 2014), yaitu: (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) UU No. 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga perangkat UU ini merupakan dasar bagi institusi Negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Melalui Undang–Undang No. 17 tahun 2003, misalnya, Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, yang meliputi: (1) Laporan realisasi APBN/APBD; (2) Neraca; (3) Laporan Arus Kas; (4) Catatan atas laporan keuangan; (5) Dilampiri laporan keuangan Negara/daerah dan badan lainnya; dan (6) Disusun sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Karena itu, pemerintah harus melakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui reformasi keuangan fiskal yang mencakup: (1) peraturan perundang-undangan; (2) kelembagaan; dan (3) system peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Bahkan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat (Paat, 2013). Adapun pihak yang berwenang dalam menjalankan kegiatan tersebut adalah pemerintah daerah yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan undang-undang (Pramono, 2014). Selain itu, laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan (Hariyanti et al., 2017).

Faktanya, tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengguna laporan mampu memahami akuntansi dengan baik. Padahal di sisi lain mereka pun mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan adanya analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah dengan cara analisis rasio keuangan (Hariyanti *et al.*, (2017). Analisis rasio keuangan sendiri didefinisikan sebagai usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim (2008).

Sedangkan analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode

sebelumnya. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan antara rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lainnya. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio efektivitas APBD, rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal dan rasio harmoni yang dipergunakan sebagai tolok ukur dalam menilai beberapa hal berikut (Halim, 2008):

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pemerintah Daerah DIY, sebagai pemerintah yang menjalankan otonomi daerah, juga harus menjalankan otonomi keuangan yang harus dilakukan secara akuntabel dan transparansi. Dengan kata lain, pemerintah daerah DIY harus mempunyai kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kemandirian pengelolaan keuangan daerah DIY ini berdasarkan opini dari BPK diketahui bahwa pemerintah daerah DIY mendapat

WTP terhadap LKPD sejak tahun 2010 sampai sekarang (2017)<sup>1</sup>. Bahkan, opini WTP oleh BPK atas LKPD di Pemerintah DIY juga di peroleh di masing-masing kabupaten/kota sejak 2012 sampai 2018, sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK atas LKPD**

No	Nama Pemda	Opini BPK						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daerah Istimewa Yogyakarta								
1.	Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Kulonprogo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Gunungkidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKP, 2019

Prestasi WTP pemerintah daerah DIY dan seluruh kabupaten/kota di Yogyakarta menunjukkan adanya kinerja keuangan yang dikelola dengan baik. Meskipun demikian, kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota di DIY tidak selalu sama (berbeda-beda). Berkaitan dengan kinerja keuangan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut, adalah menarik untuk di teliti mengenai kinerja keuangan yang meliputi rasio efektivitas APBD, rasio efisiensi APBD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio harmoni. Hal ini dimaksudkan untuk

<sup>1</sup> <http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=10071> di akses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 01.30 WIB

mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan; efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah; dan pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu dari masing-masing pemerintahan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis sementara pada rasio kemandirian di atas yang didukung juga oleh penelitian terdahulu (Sulianti dan Ika, 2012), diketahui bahwa jika dilihat dari rata-rata presentase dari ketiga rasio kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan. Peningkatan hanya terjadi pada tingkat kemandirian keuangannya, yakni sebesar 16,75%. Sehingga kinerja keuangan daerah Provinsi DIY sebelum dan sesudah otonomi daerah dinyatakan bahwa terdapat perbedaan, meskipun tidak signifikan.

Dengan adanya analisis sementara dan penelitian yang mendukung tersebut, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah dari masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah otonomi pada 2013-2017 sesuai dengan opini yang dikeluarkan oleh BPK, serta ingin menguji perbedaan pada keenam rasio disetiap kabupaten/kota di DIY. Dengan menggunakan pendekatan komperatif (perbandingan) penelitian ini ingin membandingkan kinerja keuangannya dari masing-masing kabupaten/kota di DIY, khususnya dalam mengungkap pada tahun berapa saja kinerja keuangan

mengalami peningkatan atau penurunan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan di kabupaten/kota DIY pada tahun 2013-2017 dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013-2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan ulasan yang sudah dijabarkan di atas, maka peneliti berusaha untuk menguji:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio efektivitas APBD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio efisiensi APBD dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio kemandirian dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio pertumbuhan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?

5. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?
6. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah DIY jika dilihat dari rasio harmoni dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan seperti yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas dan efisiensi APBD pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017.
2. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017.
3. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio pertumbuhan pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017.
4. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017.
5. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan rasio harmoni pada pemerintah daerah DIY dalam kurun waktu 2013-2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di DIY dengan menerapkan Rasio Efektivitas APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, serta Rasio Harmoni adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah yang ada di Provinsi DIY ditinjau dari teori Rasio Efektivitas dan Efisiensi APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, serta Rasio Harmoni dan kemudian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah yang ada di DIY.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran Pemerintah Daerah DIY didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk media belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Efektivitas dan Efisiensi APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, serta Rasio Harmoni untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian pemerintah daerah DIY.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi antara lain:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta membahas sekilas tentang penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

### **2. Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini berisi tentang teori relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian dan kerangka teori penelitian.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

### **4. Bab IV Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi dari hasil penelitian serta analisis data beserta yang diperoleh dari hasil penelitian.

### **5. Bab V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian, saran atau implikasi dari penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji beda *sample t-test* dan uji *mann-whitney* yang telah diuraikan, maka dapat di simpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas APBD tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
2. Rasio efisiensi APBD ini kinerja keuangan tidak terdapat perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
3. Rasio kemandirian terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.
4. Rasio Pertumbuhan PAD tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
5. Tingkat desentralisasi fiskal yang menduduki peringkat pertama yaitu Kota Yogyakarta sedangkan diperingkat terakhir yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rasio desentralisasi fiskal tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.

6. Rasio harmoni terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2017. Sehingga dalam hal ini  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa temuan-temuan yang dihasilkan belum secara sempurna menjawab semua permasalahan yang dibahas. Terdapat banyak keterbatasan yang melingkupi studi ini, yaitu:

1. Periode waktu yang relatif pendek yaitu 3 tahun, hal ini menjadikan analisis permasalahan kurang sempurna karena pembahasan suatu proses memerlukan periode waktu yang cukup.
2. Metode pengukuran dalam analisis rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode pengukuran sehingga menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik lagi.

## **C. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan peneliti untuk pemerintah dan penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang lebih baik adalah:

1. Bagi pemerintah daerah DIY diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan usaha pemungutan pendapat asli daerah secara lebih intensif dan aktif, dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2007–2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1(2), 18–35.
- Anggarini, Y. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif (Pertama)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ar-Rifa'i. (2000). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir (Cetakan I)*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sa'di, S. A. bin N. (2007). *Tafsir Al-Qur'an (Jilid 3)*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Bahreisy, S., & Bahreisy, S. (1993). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8 (Cetakan II)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Ketiga)*. Jakarta: Erlangga.
- Chatra, A., & Suwitra, A. (2016). Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. *Journal Benefita*, 1(3), 184–192.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) (I)*. Jakarta: PT Indeks.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia (Edisi terj)*. Jakarta: UI-Press.
- Dewi, D. M. (2016). Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah (Study pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2010-2014). *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 188–203.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–65.
- Dwijayanti, R., & Ruserlistyanti. (2013). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Seindonesia. 12, 43–66.

- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2088–2096.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002a). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2002b). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah (Pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (3 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008a). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008b). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah (Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012a). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012b). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis dan Keuangan STIE-IBEK*, 10(November), 48–59.
- <http://yogyakarta.bpk.go.id/?p=10071> di akses pada tanggal 29 Juni 2009 pukul 01.30 WIB.
- Jaenuri. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Bojonegoro dan Jombang Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(01), 33–45.
- Korompot, R., & Warongan, J. (2017). Analysis of Financial Performance In The

- Government of North Sulawesi. *Jurnal Accountability*, 06(02), 9–19.
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, & Yudi. (2018). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah*. 1(2), 27–39.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2013). *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 20–45.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Daerah* (Edisi Kedu). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pert). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Mikro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Cetakan I). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Northouse, P. (2013). *Kepemimpinan Teori dan Praktik* (Cetakan I). Jakarta: PT Indeks.
- Nufus, K., Supraptikta, H., & Muchtar, A. (2017). *Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget*. 9(3), 136–146.
- Paat, S. (2013). Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota Tomohon Degan Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 851–862.
- Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. 7(13), 83–112.
- Pravita, A. D. A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan dan Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Artikel Ilmiah*, 1–15.
- Puspita, P. A. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(1), 80–96.

- Putri, M. A. (2013). *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013*. 1–18.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahmayati, A. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Rosida, G. (2018). *Determinan Non Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Santoso, S. (2018). *Menguasai Statistik dengan SPSS 25*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiyanto, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah*.
- Simamora, H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Kedu). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sulianti, & Ika, S. R. (2012). Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 123–138.
- Sulianti, & Rochmah, S. I. (2012). *Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*. 3(2), 123–138.
- Syakhrun, M., Amin, A., & Anwar. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Profabilitas pada BAnk Umum Syariah di Indonesia. *Bongaya Journal for Research in Management*, 2(1), 1–10.
- Tamboto, L., Morasa, J., & Mawikere, Li. (2014). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi DAerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara*. 2(2), 755–767.
- Undang-Undang Nomor. 332 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

- Wulandari, A. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 2(1), 17–33.
- Wulaningrum, R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(2), 1–20.
- Yadnyana, I. K., & Muliastini, P. N. (2013). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan Sarbagita Tahun Anggaran 2007-2011. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3(1), 92–108.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review*, 4(2), 187–195.